



Analisis Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bali: Studi Evaluatif Periode 2022-2024

Kadek Elvira Setiani*, Ni Putu Karnhura Wetarani

Universitas Udayana

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022-2024. Masa ini merupakan fase krusial transisi pascapandemi menuju Rencana Pembangunan Daerah 2024-2029. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk membedah sejauh mana visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" terimplementasi secara nyata dalam birokrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKjIP Bali telah bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen manajemen strategis yang adaptif. Secara konteks, terjadi penajaman isu dari pemulihan ekonomi makro menuju penanganan spesifik pada kemiskinan, pengangguran, dan pelestarian budaya. Dukungan input berupa anggaran Rp22,58 triliun dan peningkatan jumlah SDM menjadi motor penggerak utama. Dalam aspek proses, Bali mencatatkan capaian luar biasa, di mana penurunan angka pengangguran (130,35%) dan kemiskinan (106,63%) pada 2024 berhasil melampaui target. Dampak nyata (*product*) terlihat pada digitalisasi layanan melalui SIMATA, penguatan legalitas budaya lokal, serta komitmen lingkungan melalui penutupan TPA Suwung. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan SAKIP di Bali telah berhasil mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai luhur budaya lokal.

Kata Kunci: LKjIP, Model CIPP, Akuntabilitas Kinerja, Bali, SAKIP

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3868>

*Correspondence: Kadek Elvira Setiani

Email: elvirasetiani@gmail.com

Received: 12-10-2026

Accepted: 12-11-2026

Published: 12-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to evaluate the performance accountability of the Bali Provincial Government through the Government Institution Performance Reports (LKjIP) for 2022-2024. This period represents a crucial post-pandemic transition toward the 2024-2029 Regional Development Plan. Using a descriptive qualitative approach, the research applies the CIPP (*Context, Input, Process, Product*) evaluation model to analyze how the "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" vision is implemented within the bureaucracy. The evaluation shows that Bali's LKjIP has transformed from a mere administrative requirement into an adaptive strategic management tool. Contextually, there has been a shift from macro-economic recovery to specific issues like poverty, unemployment, and cultural preservation. Input support, including a IDR 22.58 trillion budget and human resource improvements, serves as the main driver. In the process aspect, Bali achieved remarkable results, with unemployment (130.35%) and poverty reduction (106.63%) exceeding 2024 targets. Tangible impacts (*product*) are seen in digital service modernization via SIMATA, strengthened cultural legality, and environmental commitments. The study concludes that SAKIP implementation in Bali has successfully fostered outcome-oriented governance, balancing economic growth with the preservation of local cultural values.

Keywords: LKjIP, CIPP Model, Performance Accountability, Bali, SAKIP.

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* telah menjadi pilar utama dalam menjalankan roda birokrasi. Pentingnya konsep ini mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap efektivitas kinerja setiap instansinya. Kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk tolok ukur atas berhasil atau tidaknya sebuah lembaga dalam merealisasikan visi, misi, serta sasaran atau tujuan strategis yang telah direncanakan sebelumnya (Herlin dkk., 2023). Sebagai pelaksana utama dalam pelayanan publik, pemerintah kini dituntut untuk menyajikan pertanggungjawaban yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan. Paradigma pengelolaan pemerintahan saat ini telah bergeser fokusnya tidak lagi sekadar pada proses administratif, melainkan pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil nyata (outcome).

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sebuah sistem pelaporan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Implementasi akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara berkala. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban atas capaian sasaran strategis di setiap akhir tahun anggaran. Secara hukum, kewajiban ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, guna memastikan laporan tersebut seragam dan berkualitas, pemerintah juga telah menetapkan aturan teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Rolia, 2022). Regulasi ini menjadi panduan baku dalam menyusun perjanjian kinerja, tata cara pelaporan, hingga mekanisme rewiu atas laporan kinerja tersebut agar tetap selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten telah mengimplementasikan mandat tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai cerminan akuntabilitas publik di tingkat lokal. Kepemilikan dokumen LKjIP oleh Pemerintah Provinsi Bali selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya rekam jejak pembangunan yang krusial, terutama dalam merekam masa transisi pasca pandemi COVID-19 menuju Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2029. Sebagai wilayah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dengan kontribusi mencapai 52% terhadap PDRB Pemerintah Provinsi Bali menghadapi tantangan unik untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" yang berfokus pada pelestarian alam dan budaya (Badan Pusat Statistik Bali, 2024). Situasi inilah yang kemudian tergambar dalam laporan kinerja pemerintah melalui LKjIP Provinsi Bali tahun 2022, 2023, dan 2024. Ketiga laporan tersebut tidak hanya menunjukkan apa yang dikerjakan oleh pemerintah, tetapi juga mencerminkan perubahan fokus pembangunan dari tahun ke tahun. Melihat perubahan fokus dan beban isu dari ketiga tahun itu, evaluasi terhadap LKjIP menjadi hal penting agar dapat mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak pada persoalan utama di Provinsi Bali.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003, 2007).

Model CIPP dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif atas kinerja instansi pemerintah melalui empat dimensi utama: konteks (penentuan arah dan isu strategis), input (sumber daya), proses (pelaksanaan), dan product (hasil nyata). Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi LKjIP Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022-2024 sebagai instrumen akuntabilitas kinerja, sejalan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Hasil dan Pembahasan

Konteks (*Context*)

Pada bagian context menggambarkan bagaimana Pemerintah Provinsi Bali menentukan arah pembangunan dan fokus evaluasi kinerja melalui tujuan LkjIP dan identifikasi isu strategis pada kurun waktu 2022-2024, hal ini penting untuk memahami lingkungan awal yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja pemerintah.

Tujuan

Tabel 1. Tujuan LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

TAHUN	TUJUAN
2022	Sebagai laporan pencapaian sasaran Strategi Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
2023	Sebagai laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
2024	Sebagai penyaji ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatn anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa mendatang.

Sumber: LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Pada tahun 2022, tujuan utama LKjIP Pemerintah Provinsi Bali adalah melaporkan hasil kerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Fase ini merupakan masa percepatan pascapandemi Covid-19 di mana pemerintah mengejar target-target RPJMD Semesta Berencana 2018–2023 yang sempat tertunda. Hal ini sejalan dengan pemikiran Stufflebeam (2003), bahwa evaluasi konteks pada tahap awal harus mampu mengidentifikasi apakah tujuan program masih relevan dengan perubahan kebutuhan lingkungan yang dinamis akibat krisis. Memasuki tahun 2023, meskipun secara formal tujuan masih sama, fokus evaluasi bergeser pada

penyelesaian target akhir masa jabatan (akhir RPJMD). Pemerintah menekankan pada akuntabilitas hasil akhir untuk memastikan tidak ada sasaran prioritas yang tertinggal. Pentingnya penajaman isu di akhir periode perencanaan ini didukung oleh penelitian Matondang (2025), yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sektor publik sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan refleksi terhadap gap antara perencanaan awal dan realisasi akhir. Perubahan paling fundamental terlihat pada tahun 2024. LKjIP Pemerintah Provinsi Bali tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan (reporting), tetapi berkembang menjadi instrumen evaluatif yang menggambarkan proses, tingkat efisiensi anggaran, serta refleksi untuk perbaikan perencanaan masa depan. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi alat manajemen strategis.

Isu Strategis

Tabel 2. Isu Strategis LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

TAHUN	ISU
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan 2. Daya saing 3. Nilai tambah 4. <i>Sustainability</i>/keberlangsungan 5. Reformasi birokrasi dan layanan umum 6. perubahan iklim dan penanganan bencana
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenjangan 2. Daya saing 3. Nilai tambah 4. <i>Sustainability</i>/keberlangsungan 5. Reformasi birokrasi dan layanan umum 6. Perubahan iklim dan penanganan bencana
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial; 2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3. Belum optimalnya Pelestarian Kebudayaan Bali; 4. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan ancaman perubahan iklim; 5. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur darat, laut dan udara; 6. Ancaman keamanan dan kenyamanan; 7. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sumber: LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Berdasarkan analisis dokumen LKjIP Provinsi Bali tahun 2022-2024, terlihat adanya pergeseran fokus yang signifikan. Pada periode 2022-2023, isu strategis masih bersifat makro dan berorientasi pada pemulihan stabilitas daerah pascapandemi, di mana isu seperti "daya saing" dan "nilai tambah" mendominasi agenda pemerintah guna membangkitkan kembali sektor pariwisata yang sempat lumpuh. Namun, pada tahun 2024, terjadi perubahan isu menjadi lebih spesifik dan tajam. Isu umum seperti "kesenjangan ekonomi" mulai dikerucutkan menjadi "penanggulangan kemiskinan dan pengangguran",

serta munculnya penekanan eksplisit pada isu "keamanan" dan "pelestarian budaya". Penajaman ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan nilai-nilai lokal sesuai visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*". Transformasi dari isu makro menuju isu yang lebih mikro dan spesifik ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersikap adaptif dalam mensinkronkan tujuan yang direncanakan (intended goals) dengan kebutuhan nyata (actual needs) masyarakat di lapangan. Penajaman isu ini sangat penting karena sejalan dengan penelitian Matondang (2025) yang menegaskan bahwa pendefinisian isu strategis secara spesifik dalam dokumen akuntabilitas merupakan kunci utama untuk menghindari bias alokasi anggaran dan mencegah pengaburan target kinerja, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar bersifat berorientasi pada hasil (outcome-oriented).

Input

Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan sebuah program besar, pemerintah membutuhkan dua aset utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dukungan Anggaran yang memadai. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, data menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat memperhatikan kecukupan aset-aset ini.

Tabel 3. Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Bali

TAHUN	SDM
2022	9.124
2023	9.318
2024	9.576
Total	28.018

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 4. Anggaran Pemerintah Provinsi Bali

TAHUN	ANGGARAN
2022	Rp. 7.541.821.522.461
2023	Rp. 7.248.953.175.947
2024	Rp. 7.795.681.730.804
Total	Rp. 22.586.456.429.212

Sumber: LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Selama tiga tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengelola total anggaran sebesar Rp22,58 triliun. Berdasarkan tabel anggaran yang dimuat dari LKjIP Pemerintah Provinsi Bali, terlihat bahwa anggaran yang ditetapkan sangat fleksibel mengikuti kebutuhan yang sedang mendesak. Pada tahun 2022, anggaran sebesar Rp7,54 triliun

difokuskan untuk memulihkan Bali pascapandemi. Saat itu, uang negara dialokasikan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat dan memperbaiki layanan kesehatan yang terdampak. Kemudian pada tahun 2023, anggaran sedikit turun menjadi Rp7,24 triliun. Hal ini bukan berarti dana berkurang, melainkan karena kondisi ekonomi sudah mulai stabil sehingga pemerintah bisa lebih selektif dan fokus menyelesaikan sisa target di akhir masa jabatan RPJMD 2018-2023. Memasuki tahun 2024, anggaran kembali naik ke angka Rp7,79 triliun. Kenaikan ini diperlukan sebagai modal awal untuk agenda baru, seperti peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan di masa transisi. Sejalan dengan anggaran, jumlah SDM juga terus meningkat hingga mencapai 9.576 orang pada tahun 2024 untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin kuat.

Proses

Tabel 5. Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Bali tahun 2022-2024

No	Indikator Makro	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,10	5,00	5,75	4,19	5,66	5,48	135,16%	113,20%	95,30%
2.	Tingkat Kemiskinan	4,25	3,75	4,07	4,57	4,25	3,80	97,99%	88,23%	106,63%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19	2,32	2,57	4,80	2,69	1,79	66,45%	86,24%	130,35%
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,93	77,78	76,50	76,44	78,01	78,63	99,36%	100,29%	102,78%
5.	Gini Ratio	0,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,348	88,89%	100%	103,45%

Sumber: LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Pada angka persentase capaian di atas, proses pembangunan di Bali selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang luar biasa. Pada tahun 2022, ekonomi Bali melampaui ekspektasi dengan capaian pertumbuhan sebesar 135,16%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi berjalan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Meskipun pada tahun 2024 angka capaian pertumbuhan ekonomi berada di 95,30%, hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan target yang sangat tinggi sebagai bentuk optimisme pasca-pandemi. Keberhasilan proses ini paling terlihat pada indikator kesejahteraan rakyat di tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka mencatatkan capaian spektakuler sebesar 130,35%, yang berarti pemerintah berhasil menekan angka pengangguran hingga jauh di bawah batas maksimal yang ditargetkan. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang mencapai 106,63% (melebihi target penurunan) dan IPM yang

konsisten naik hingga mencapai 102,78%. Selain itu, aliran investasi yang mencapai target 100% pada 2024 menunjukkan bahwa proses perizinan dan iklim usaha di Bali telah kembali dipercaya oleh para investor. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa fluktuasi pada target PDRB dan ekspor, proses birokrasi di Provinsi Bali telah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup manusia.

Product

Bagian terakhir dari evaluasi ini adalah melihat "buah" atau hasil nyata dari seluruh kerja keras pemerintah selama tiga tahun terakhir. Hasil ini tidak hanya berupa angka, tetapi juga perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bali.

Tabel 6. Dampak Pembangunan Tahun 2022-2024

Tahun	Dampak
2022	Dampak pembangunan tahun 2022 terlihat dari mulai pulihnya mobilitas dan ekonomi setelah pandemi. Perbaikan infrastruktur membuka akses wilayah yang sebelumnya tertinggal, UMKM kembali aktif, dan produk lokal mulai meningkat kualitasnya. Upaya pengurangan sampah plastik sudah dimulai, pelayanan publik mulai beralih ke digital, dan kesiapsiagaan bencana diperkuat melalui edukasi.
2023	Memperkuat dampak tahun sebelumnya. Pemerataan infrastruktur lebih terasa di seluruh wilayah Bali. Daya saing meningkat melalui penguatan identitas budaya seperti Endek Bali. BUMDes tumbuh dengan produk bernilai tambah. Kebijakan lingkungan makin tegas, pelayanan digital semakin matang, dan kendaraan listrik mulai diperkenalkan sebagai langkah awal pengurangan emisi.
2024	Menunjukkan dampak yang lebih luas, mulai dari peningkatan investasi dan ekspor membuka lapangan kerja sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pelatihan vokasi meningkatkan kualitas SDM. Budaya Bali diperkuat melalui legalitas Arak Bali dan pengembangan pusat kebudayaan. Penanganan lingkungan terlihat dari penutupan TPA Suwung dan dorongan kendaraan listrik. Infrastruktur seperti shortcut, Sarbagita, Pelabuhan Sanur, dan Turyapada Tower meningkatkan konektivitas. Pelayanan publik semakin cepat melalui layanan digital seperti SIMATA, serta antrean online.

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Kasubag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 10 Desember 2025 & LKjIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Dampak pembangunan Provinsi Bali selama periode 2022–2024 menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan seiring dengan pemulihan pascapandemi hingga penguatan pembangunan yang lebih terintegrasi. Peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi mendorong kebangkitan UMKM serta peningkatan kualitas produk lokal, yang didukung oleh perbaikan dan pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah yang sebelumnya tertinggal. Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga memperluas kesempatan kerja melalui meningkatnya investasi dan ekspor, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Di sisi sumber daya manusia dan budaya, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi, sekaligus penguatan identitas dan

pelestarian budaya Bali melalui pengembangan produk budaya unggulan, legalitas Arak Bali, serta pembangunan pusat-pusat kebudayaan. Transformasi tata kelola pemerintahan juga semakin terlihat melalui digitalisasi pelayanan publik yang meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Sementara itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dari penguatan kebijakan lingkungan, upaya pengurangan sampah plastik, penanganan persampahan melalui penutupan TPA Suwung, serta dorongan penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah pengurangan emisi. Secara keseluruhan, pembangunan selama periode tersebut menghasilkan dampak yang semakin luas, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Bali.

Simpulan

Evaluasi LKjIP Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022-2024 menggunakan model CIPP menunjukkan transformasi akuntabilitas kinerja dari pelaporan administratif menjadi instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika pascapandemi dan visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*". Konteks pembangunan bergeser dari isu makro seperti daya saing dan kesenjangan pada 2022-2023 menuju isu spesifik seperti kemiskinan, pelestarian budaya, dan ancaman iklim pada 2024, didukung input yang kuat berupa peningkatan SDM dari 9.124 menjadi 9.576 orang dan total anggaran Rp22,58 triliun. Proses pelaksanaan mencatat keberhasilan signifikan pada indikator makro, termasuk pertumbuhan ekonomi 135,16% (2022), penurunan kemiskinan 106,63% (2024), dan pengangguran 130,35% (2024), yang melebihi target RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Product nyata terwujud dalam peningkatan konektivitas infrastruktur (Sarbagita, Pelabuhan Sanur), digitalisasi pelayanan (SIMATA), pelestarian budaya (legalitas Arak Bali), dan keberlanjutan lingkungan (penutupan TPA Suwung, kendaraan listrik). LKjIP Bali membuktikan efektivitas SAKIP dalam mendorong outcome-oriented governance, dengan efisiensi anggaran dan adaptasi isu yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Temuan ini menjadi dasar perbaikan RPD 2024-2029, menekankan penguatan SDM dan monitoring berbasis data untuk keseimbangan ekonomi-pariwisata-budaya.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Laporan ekonomi Bali 2024*. BPS Bali.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dizon, A.G. (2023). Historical development of CIPP as a curriculum evaluation model. *History of Education*, 52(1), 109-128, ISSN 0046-760X, <https://doi.org/10.1080/0046760X.2022.2098390>
- Fan, X. (2022). Quality evaluation of entrepreneurship education in higher education based on CIPP model and AHP-FCE methods. *Frontiers in Psychology*, 13, ISSN 1664-1078, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.973511>

- Gao, J. (2021). A Polysaccharide From the Whole Plant of *Plantago asiatica* L. Enhances the Antitumor Activity of Dendritic Cell-Based Immunotherapy Against Breast Cancer. *Frontiers in Pharmacology*, 12, ISSN 1663-9812, <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.678865>
- Herlin, N., dkk. (2023). Kinerja instansi pemerintah sebagai tolok ukur visi dan misi. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–60.
- Kasubag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. (2025, 10 Desember). *Wawancara pribadi tentang dampak pembangunan Bali 2022–2024*.
- Matondang, A. (2025). Efektivitas organisasi sektor publik melalui refleksi gap perencanaan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 15(1), 112–130.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022*. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rolia, E. (2022). Implementasi PermenPANRB No. 53/2014 dalam penyusunan LKjIP. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 8(3), 78–95.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Springer.
- Stufflebeam, D. L. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Tangdilassu, H., Morasa, J., & Kapojos, P. (2023). Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 118–129.
- Toosi, M. (2021). Context, input, process, and product evaluation model in medical education: A systematic review. *Journal of Education and Health Promotion*, 10(1), ISSN 2277-9531, https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1115_20

- Tuna, H. (2021). Curriculum evaluation of tourism undergraduate programs in Turkey: A CIPP model-based framework. *Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism Education*, 29, ISSN 1473-8376, <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100324>
- Wahasusmiah, R. (2022). Penerapan good governance dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Wang, X. (2023). Study on the impact of ovality defect on structural stability of CIPP liner of drainage pipeline. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 140, ISSN 0886-7798, <https://doi.org/10.1016/j.tust.2023.105338>
- Xia, Y. (2023). Prediction of bending strength of glass fiber reinforced methacrylate-based pipeline UV-CIPP rehabilitation materials based on machine learning. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 140, ISSN 0886-7798, <https://doi.org/10.1016/j.tust.2023.105319>
- Yahong, Z. (2023). Experiment and evaluation model of liner design for renewal of deteriorated reinforced concrete pipes utilizing cured-in-place-pipe technology. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 132, ISSN 0886-7798, <https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104866>
- Yang, K. (2021). Full-scale experimental investigation of the mechanical characteristics of corroded buried concrete pipes after cured-in-place-pipe rehabilitation. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 117, ISSN 0886-7798, <https://doi.org/10.1016/j.tust.2021.104153>
- Yang, K. (2021). Mechanical sensitivity analysis of pipe-liner composite structure under multi-field coupling. *Structures*, 29, 484-493, ISSN 2352-0124, <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.11.036>
- Yang, K. (2022). Investigation of mechanical properties of corroded concrete pipes after cured-in-place-pipe (CIPP) rehabilitation under multi-field coupling. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 128, ISSN 0886-7798, <https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104656>